BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penyebaran Misi Perdamaian di Somalia

Uni Afrika telah membentuk *Peace Support Operations* (PSOs) atau operasi dukungan untuk perdamaian sejak tahun 2003. PSOs pertama yaitu *An African Union Mission in Burundi* (AMIB) dibentuk untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan menjaga perdamaian di Burundi. AMISOM telah dibentuk pada tahun 2007 yang merupakan PSOs ketiga yang didirikan oleh Uni Afrika. Uni Afrika pun telah mengirimkan misi yang lebih kecil ke pulau Komoro dan juga mengirimkan misi perdamaian di Darfur.

Uni Afrika bekerjasama dengan negara-negara anggota dan negara-negara mitra dari Uni Afrika untuk meningkatkan kemampuannya dalam perencanaan, menyebarkan maupun dalam mengelola PSOs. Kemampuan dan tanggung jawab dari Uni Afrika untuk melakukan misi perdamaian dalam menciptakan keamanan di kawasannya lebih berat dibandingkan dengan organisasi regional lainnya seperti organisasi regional di kawasan Asia, Amerika Selatan, maupun Timur Tengah karena Uni Afrika sebagai sebuah organisasi regional dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan Afrika dan kebanyakan dari negara-negara anggota Uni Afrika masih mengalami konflik.

Dalam mendirikan AMISOM terdapat banyak kesulitan yang harus dilalui. Awal pembentukan misi perdamaian untuk Somalia dilakukan oleh *Intergovernmental Authority for Development* (IGAD) namun rencana tersebut

tidak dapat dilakukan karena banyak kendala yang dihadapi oleh IGAD dan rencana pengambilalihan misi di Somalia oleh PBB pun belum membuahkan hasil.

4.1.1. Proses Penyebaran AMISOM

Pada awal 2003 Uni Afrika memulai persiapan dengan mengirimkan pengamat militer ke Somalia atas permintaan dari *Intergovernmental Authority for Development* (IGAD). IGAD adalah blok regional Afrika Timur yang terdiri dari 7 negara yaitu Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda, sedangkan Eritrea keanggotaannya dibekukan. Namun situasi yang tidak aman di Somalia menunda untuk penyebaran misi tersebut. Pada saat situasi keamanan tidak terkendali Presiden TFG Abdullahi Yusuf menyatakan perlunya PSOs untuk segera mengirimkan misinya ke Somalia. tidak lama kemudian Uni Afrika mengadakan pertemuan yang mengusulkan perlunya pengiriman misi perdamaian ke Somalia dengan adanya mandat yang bertujuan untuk melindungi TFG, memfasilitasi pelucutan senjata, dan melatih pasukan keamanan. Tidak lama setelah itu Uganda telah menjanjikan untuk mengirimkan pasukannya dalam misi tersebut.

Akhir Januari 2005 sebuah keputusan dibuat dengan IGAD untuk melaksanakan misi perdamaian ke Somalia. Djibouti, Ethiopia, Kenya, Sudan, dan Uganda ditawarkan untuk ikut berpartisipasi. IGASOM diberi wewenang oleh PSC Uni Afrika pada bulan februari 2005. IGASOM juga diberi wewenang oleh

Komisi Uni Afrika untuk melaporkan secara rinci tentang kemungkinan mendirikan sebuah operasi perdamaian di Somalia.

Misi perdamaian pun menghadapi beberapa permasalahan antara lain yaitu Pengadilan Islam dan kelompok-kelompok ekstrimis lainnya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima tentara asing di wilayah Somalia, selain itu masalah lainnya adalah mengenai masalah embargo senjata oleh PBB kepada Somalia yang telah diberlakukan sejak tahun 1992 perlu direvisi supaya PSOs dapat mentransfer senjata ke Somalia.

Pada Mei 2005 PSC Uni Afrika menyetujui untuk mengirimkan IGASOM dengan tujuan mendukung *Transitional Federal Government* (TFG), melatih tentara Somalia, mendukung pelucutan senjata, pemantauan situasi keamanan, dan memfasilitasi operasi kemanusiaan. ICU yang telah menguasai Mogadishu menyatakan kesediaannya untuk berdialog dengan pemerintah tetapi selama IGAD tidak campur tangan terhadap permasalahan di Somalia karena misi dari IGASOM terdiri dari pasukan negara-negara Djibouti, Ethiopia dan Kenya yang bagi ICU negara-negara tersebut dianggap tidak netral.

Pada awalnya IGASOM dibentuk oleh pasukan dari Uganda dan Sudan namun ada masalah keterbatasan dana dalam melakukan hal tersebut. Masalah embargo senjata pun menjadi halangan karena Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa diperlukan rencana secara rinci pada misi tersebut untuk mempertimbangkan permintaan pencabutan embargo di Somalia.

Pada bulan Agustus 2006 IGAD telah mengembangkan rencana untuk penyebaran IGASOM. Namun Djibouti ragu mengenai penyebaran misi tersebut jika misi tersebut tidak diterima oleh semua pihak di Somalia. Pada tanggal 6 Desember 2006 DK-PBB dan Uni Afrika dengan resmi menyetujui IGAD untuk mendirikan sebuah misi di Somalia. Keputusan tersebut disambut baik oleh TFG namun ditolak oleh ICU.

Sudan dan Uganda adalah negara yang memberikan pasukannya untuk bergabung, tetapi Sudan sendiri sedang berjuang dengan konflik internalnya sehingga pasukan yang dikirim sangat kecil jumlahnya dan dalam kenyataannya hanya Uganda yang mampu dalam menyumbangkan pasukannya.

Untuk dapat melaksanakan misinya IGAD sendiri harus merubah piagam dari IGAD karena dalam piagam tersebut terdapat prinsip non-intervensi tentang urusan internal negara-negara anggota yang ditetapkan dalam piagam tersebut. Selain itu IGAD harus memikirkan kembali mengenai misinya karena keterbatasan pasukan yang dimilikinya.

Misi yang direncanakan oleh IGAD pun tidak pernah berhasil untuk dijalankan, oleh karena itu Uni Afrika perlu mengambil alih dalam penyebaran misi perdamaian tersebut. Alasan penting untuk mengubah IGASOM menjadi misi Uni Afrika adalah adanya pasukan dari berbagai anggota Uni Afrika yang tentunya lebih luas.

Ketegangan dan kekerasan antara TFG dan ICU meningkat di Somalia. pada akhir Desember 2006. Ethiopia akhirnya campur tangan dalam konflik yang terjadi di Somalia dengan alasan mendukung TFG. Ide penyebaran dari misi

IGAD ditinggalkan dan berkonsentrasi pada operasi penyebaran misi perdamaian dari Uni Afrika.

Akhirnya sebuah proposal mengenai misi Uni Afrika di Somalia untuk pertama kalinya menggunakan singkatan AMISOM yang disarankan oleh Komisi Uni Afrika dan disetujui oleh *African Union Peace and Security Council* (PSC). Kemudian mandat ditambahkan untuk membantu dalam pemindahan pengungsi, mendukung upaya rekonstruksi dan membantu TFG untuk pindah ke Somalia yang pada awal pendiriannya masih berada di Kenya. Kebutuhan terhadap dukungan penuh dari PBB dan Uni Eropa tentang manajemen dan perencanaan misi juga telah dinyatakan oleh Uni Afrika. Setelah itu tim pencari fakta dikirim ke Somalia untuk mempersiapkan perencanaan misi tersebut.

IGASOM jelas tidak mampu meyebarkan misi perdamaian maka PSC Uni Afrika memutuskan untuk mengizinkan penyebaran AMISOM pada tanggal 19 Januari 2007 dalam rangka menggantikan pasukan Ethiopia yang berada di Somalia.

4.1.2. Rencana Pengambilalihan Misi Perdamaian oleh PBB

AMISOM pada mulanya ditempatkan dengan maksud bahwa PBB akan segera mengambil alih tanggung jawab PSOs di Somalia. Kondisi keamanan yang tidak stabil akan memberikan kesulitan bagi AMISOM dalam menjalankan usahanya untuk mengendalikan situasi dan melakukan kegiatan operasional.

Pada awal pembentukan misi perdamaian AMISOM, rencana pengambilalihan misi akan dilakukan setelah AMISOM menjalankan tugasnya

selama 6 bulan di Somalia setelah itu misi akan diambil alih oleh PBB namun hingga perpanjangan mandat AMISOM sampai 2010 misi perdamaian belum juga diambil alih oleh PBB.

Dalam situasi yang sedemikian kacau menurut Sekretaris Jenderal PBB yaitu Ban-Ki Moon tidak memungkinkan untuk menyebarkan misi perdamaian PBB, sebaliknya menurut Ban-Ki Moon bahwa misi penegakan perdamaian dilakukan oleh sebuah koalisi yang kemudian baru disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Karena belum ada keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB maka PBB memperpanjang mandat AMISOM untuk tambahan enam bulan selama beberapa kali sampai terakhir kali melalui resolusi PBB No. 1910 yang di dalamnya menegaskan bahwa mandat AMISOM diperpanjang hingga 31 Januari 2011.

Pada saat perpanjangan misi AMISOM untuk pertama kali Uni Afrika meminta supaya PBB memberikan dukungan kepada AMISOM dalam hal keuangan, logistik, dan dukungan teknis. Uni Afrika menekankan perlunya dukungan dan perhatian dari PBB yang memiliki tanggung jawab utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. PBB baru akan megirimkan misinya setelah situasi di Somalia telah aman, Ethiopia telah menarik diri, dan kehadiran PBB telah diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di negara tersebut.

4.2. Mandat AMISOM Dalam Menangani Konflik Bersenjata Antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU) di Somalia.

Dalam menangani konflik bersenjata yang terjadi di Somalia AMISOM diberikan tiga mandat untuk dilaksanakan sebagai tujuan dari penyebaran misi perdamaian di Somalia. Tiga mandat tersebut antara lain (1) mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) dalam upaya menstabilkan negara, dialog, & rekonsiliasi; (2) memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan; (3) menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang, & rekonstruksi.

Pertama, mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) dalam upaya menstabilkan negara, dialog, & rekonsiliasi merupakan sebuah tugas yang diberikan kepada AMISOM dalam upaya menangani konflik yang terjadi antara TFG dan ICU. Dukungan AMISOM kepada TFG yang merupakan pemerintahan Somalia dibutuhkan untuk membantu pemerintahan dalam menangani konflik yang terjadi di Somalia dan juga agar konflik yang terjadi tidak menimbulkan banyak korban jiwa serta tercipta kestabilan negara dengan cara memfasilitasi sebuah forum dialog antara pihak-pihak yang bertikai dengan dicapainya sebuah perdamaian dan juga tercapainya sebuah rekonsiliasi.

Kedua, memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan. Mandat ini diperlukan bagi AMISOM karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat Somalia berupa obat-obatan, makanan, pakaian, dan perlengkapan lainnya sering tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan karena bantuan tersebut dijarah oleh para pemberontak. Dibutuhkan pasukan yang dilengkapi peralatan

militer untuk dapat memberikan bantuan-bantuan tersebut secara langsung karena untuk menghindari resiko dalam pengiriman untuk melawan pemberontak yang berupaya menjarah bantuan tersebut.

Ketiga, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang, & rekonstruksi. Mandat ini bertujuan menciptakan perdamaian di Somalia dalam jangka panjang sampai AMISOM meninggalkan Somalia. Setelah perdamaian dicapai dengan adanya kesepakatan diantara pihak-pihak yang bertikai kemudian selanjutnya adalah mengupayakan proses rekonstruksi untuk membangun kembali Somalia paska konflik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan konflik yang dialami tidak terulang kembali.

4.3. Langkah-Langkah yang Dilakukan Oleh AMISOM Dalam Menangani Konflik Bersenjata Antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU) di Somalia.

Terdapat beberapa langkah yang diambil dalam menjalankan misi dari AMISOM. Sebagai langkah awal untuk melaksanakan mandat yang telah diberikan kepada AMISOM maka hal pertama yang dilakukan adalah langkah politik, dan rencana dukungan terhadap misi. Langkah politik yaitu membentuk *Special Representative of the Chairperson of the Commission* (SRCC) untuk mengawasi misi dari AMISOM yang terdiri dari komponen militer, polisi, dan komponen administratif yang akan melaporkan kegiatan kepada kepala Komisi Uni Afrika melalui Komisaris Perdamaian dan Keamanan. Deputi SRCC ditunjuk untuk mendukung SRCC dalam melaksanakan tugasnya. Selain untuk mengelola

AMISOM, SRCC akan diberi tugas untuk mengupayakan dalam mendirikan dan meningkatkan kelembagaan dari TFG dan meminta dukungan internasional, serta memastikan dan memberantas kondisi politik yang tidak kondusif yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan di Somalia.

Pada tahap pra penyebaran AMISOM, SRCC mendirikan markas misi sementara di Nairobi, Kenya, dan Uganda. Setelah komponen militer AMISOM dan kepolisian telah disebar dan dapat mengamankan Mogadishu maka SRCC pindah ke Mogadishu yang menjadi tempat bagi markas dari misi.

Langkah rencana misi yaitu SRCC mengembangkan dan menerbitkan rencana misi dari pelaksanaan AMISOM dengan memperhitungkan semua aspek logistik yang terlibat dalam mendirikan dan melaksanakan AMISOM sampai PBB mengambil alih misi. Rencana ini akan menentukan kekuatan yang lebih besar. Melihat situasi yang terjadi di Somalia, rencana ini juga memperhitungkan untuk mendirikan markas logistik baik di Nairobi maupun Kenya.

Setelah didirikannya SRCC, selanjutnya langkah yang diambil adalah membuat sebuah konsep operasi yang disebut dengan istilah AMISOM *Concept of Operation* (CONOPS). Konsep tersebut bertujuan untuk menyebarkan, mengendalikan dan menstabilkan situasi keamanan di Mogadishu yang disebut sebagai sektor 2 dan kemudian akan menyebar ke wilayah lain di luar Mogadishu.

Operasi AMISOM akan dilakukan dalam empat tahap sebagai berikut:

- Tahap I - Tahap I adalah penyebaran awal 9 batalion untuk Sektor 2, yaitu Mogadishu. Hal ini akan melibatkan eksekusi oleh Kepala Komponen Militer, yaitu Panglima Angkatan AMISOM (*Force Commander*

AMISOM), untuk memastikan lingkungan yang aman dan damai di dalam dan sekitar Mogadishu sehingga dapat melaksanakan tahap selanjutnya yaitu Tahap 2 dan memungkinkan *Reconciliation and Restoration Council* (SRRC) untuk pindah ke Somalia.

- Tahap II - Tahap Ekspansi. Tahap II adalah perluasan misi dengan menyebarkan unit yang didominasi militer ke sektor lain.
- Tahap III - Konsolidasi. Tahap III adalah Tahap Konsolidasi yang akan melibatkan pelaksanaan dari mandat AMISOM dan tugas yang telah ditetapkan oleh PSC Uni Afrika.
- Tahap IV - Tahap pemindahan. Tahap IV adalah pemindahan atau pengambilalihan misi oleh PBB.

Setelah adanya tahap-tahap berupa pendirian SRCC dan merencanakan CONOPS maka langkah selanjutnya adalah AMISOM menjalankan mandat yang telah diberikan kepadanya untuk menangani konflik yang terjadi antara TFG dan ICU di Somalia.

4.3.1. Mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) Dalam Upaya Menstabilkan Negara, Dialog, & Rekonsiliasi

4.3.1.1. Mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) Dalam Upaya Menstabilkan Negara

Dengan diturunkannya AMISOM ke Somalia dengan tujuan untuk membantu TFG dalam melawan pemberontakan. Mandat tersebut diperlukan oleh pasukan AMISOM untuk melakukan perlawanan terhadap pemberontakan yang

terus menerus berusaha menggulingkan pemerintahan di Somalia. AMISOM telah melakukan perlawanan kepada pemberontak dan berhasil mengambil alih bagian utara Mogadishu yang pada awalnya dikuasai oleh pemberontak sehingga memaksa pemberontak untuk mundur keluar dari ibukota Somalia tersebut.

Selain itu, dalam upaya mendukung pemerintahan Somalia AMISOM melakukan pengawasan dan penjagaan ketat di pelabuhan, bandara, dan kota-kota penting serta penjagaan di kediaman presiden Somalia. Penjagaan tersebut dilakukan agar pemberontak tidak menguasai wilayah-wilayah penting di Somalia.

Pada tanggal 31 Januari 2009 Syeikh Sharif Ahmed meraih kemenangan menjadi Presiden Somalia dalam pemungutan suara di parlemen dengan 200 pejabat dari jumlah 275 anggota di DPR dari oposisi Islam moderat memilih Syeikh Sharif Ahmed sebagai Presiden Somalia yang baru. (sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Somalia_(2006%E2%80%932009) – diakses pada 30 Juli 2010).

Pemilihan dilakukan di parlemen yang digelar di Djibouti. Terciptanya pemilihan presiden tersebut berlangsung secara damai. Pengawasan dilakukan oleh AMISOM untuk memastikan bahwa pemilihan tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi kekerasan yang dikhawatirkan ditimbulkan oleh pihak oposisi. Dengan adanya pemantauan dan penjagaan secara ketat maka pemilihan yang dilakukan berlangsung aman tanpa ada serangan yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pemilihan.

4.3.1.2.Mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) Dalam Upaya Dialog dengan Pihak yang Bertikai

TFG dan kelompok Islamis berpartisipasi dalam konferensi perdamaian di Djibouti antara 31 Mei 2008 dan 9 Juni 2008. Konferensi ini berakhir dengan pengumuman pada tanggal 9 Juni 2008 bahwa telah ditandatangani perjanjian damai yang membuka jalan bagi penghentian semua konfrontasi bersenjata di Somalia. Perjanjian damai tersebut menyerukan untuk menetapkan penarikan pasukan Ethiopia.

Menurut perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri semua tindakan konfrontasi bersenjata dan permintaan PBB untuk mengotorisasi dan menggunakan pasukan stabilitas internasional dari negara-negara yang merupakan teman dari Somalia yang tidak termasuk negara-negara tetangga. Pakta perdamaian ini juga menyerukan penarikan pasukan Ethiopia di Somalia hadir dalam jangka waktu 120 hari dari penandatanganan perjanjian ini. Penarikan pasukan Ethiopia tersebut disebabkan karena AMISOM telah melakukan misi perdamaian di Somalia dan sesuai dengan janji dari Ethiopia akan menarik diri setelah misi perdamaian tiba di Somalia. Dengan penarikan pasukan Ethiopia membuat masyarakat Somalia lega karena tidak ada lagi intervensi dari Ethiopia di negara mereka.

AMISOM juga mendukung proses negosiasi yang dilakukan oleh TFG dengan kelompok oposisi dengan memantau proses negosiasi tersebut. Sebuah negosiasi tersebut merupakan upaya untuk kerjasama masa depan dengan

kelompok lainnya dan dengan adanya negosiasi tersebut diharapkan TFG dapat meningkatkan komitmen akan tercapainya perdamaian dan stabilitas di Somalia.

4.3.1.3.Mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) Dalam Upaya Rekonsiliasi

Setelah terpilih menjadi presiden Somalia yang baru Presiden Syeikh Sharif Ahmed juga memenuhi permintaan gencatan senjata dan rekonsiliasi dengan para anggota oposisi. AMISOM sesuai dengan mandat yang diberikan kepadanya mendukung upaya damai dan rekonsiliasi di Somalia dan menyambut baik upaya oleh Pemerintah transisi di Somalia untuk mencapai kelompok-kelompok oposisi yang bersedia bergabung dalam proses perdamaian.

TFG berupaya melakukan rekonsiliasi nasional antar suku/klan dengan bantuan dan dukungan dari PBB, Liga Arab, Uni Afrika, dan Uni Eropa. AMISOM sendiri tetap berada di Somalia untuk mendukung TFG dalam menjaga situasi politik dan keamanan.

Upaya rekonsiliasi nasional yang dilakukan oleh TFG dengan bantuan PBB, Liga Arab, Uni Eropa, dan Uni Afrika melalui AMISOM akhirnya membuahkan hasil, dengan disepakatinya kesepakatan damai dan gencatan senjata antara TFG dengan kelompok Islamis pada bulan Juni 2008 di Djibouti, dengan dihasilkannya kesepakatan bersama untuk melangkah bersama secara damai dan mempersilahkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Somalia yang tersendat.

Pada Januari 2009, rekonsiliasi dan kesepakatan pembagian kekuasaan ditengahi antara TFG dan kontingen Djibouti dari bekas ICU yang mengakibatkan

perluasan Parlemen dan pemilihan Syeikh Sharif Ahmed, mantan pemimpin ICU sebagai Presiden TFG yang baru. Pembagian kekuasaan dilakukan antara Perdana Menteri Adde Nur Hassan Hussein dan Presiden Somalia yang baru yaitu Syeikh Sharif Ahmed.

4.3.2. Memfasilitasi Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Dalam melaksanakan tugas yang telah dimandatkan kepadanya, AMISOM telah melakukan beberapa hal. Batalion dari Uganda berbasis di bandara Mogadishu sebagai awal dari misi yang dilakukan dengan menjaga keamanan di sekitar lapangan udara dan melakukan patroli di bagian lain Mogadishu untuk menjaga kedatangan peralatan yang dibutuhkan. Sedangkan pasukan dari Burundi menjaga pelabuhan Mogadishu dan juga kediaman Presiden Somalia.

Dalam misi kemanusiaan yang diberikan sesuai dengan mandat AMISOM pada bulan Maret 2007 menjaga semua wilayah yang merupakan jalur bagi akses bantuan kemanusiaan. Jalur yang dijaga secara ketat adalah pelabuhan, bandara, jalan-jalan utama Mogadishu sehingga memungkinkan akses kemanusiaan dapat berjalan lancar untuk diberikan kepada penduduk miskin maupun pengungsi yang ada di Somalia. AMISOM juga menyediakan pendamping untuk konvoi bantuan kemanusiaan menuju titik distribusi di dalam maupun di sekitar Mogadishu. Bantuan kepada pengungsi diberikan berupa makanan, kesehatan, obat-obatan, dan bantuan pencarian suaka kepada pengungsi di Somalia terutama yang berasal dari Ethiopia.

AMISOM juga memberikan jasa kesehatan dan tenaga medis bagi masyarakat Somalia meskipun pada awalnya fasilitas tersebut dirancang untuk memberikan pertolongan medis kepada pasukan AMISOM. Mengingat situasi yang buruk di Somalia fasilitas medis AMISOM kini telah menjadi titik medis dimana penduduk sipil yang berada di Mogadishu dan sekitarnya bergantung.

AMISOM bekerjasama dengan lembaga-lembaga PBB seperti *World Food Program* (WFP), *World Health Organization* (WHO), dan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Di Somalia UNICEF memberikan bantuan kesehatan dan gizi, air, sanitasi dan kebersihan, pendidikan, perlindungan terhadap anak, HIV/AIDS, dan memberikan bantuan perlengkapan sekolah dan buku-buku untuk sekolah di Somalia.

AMISOM melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan. Salah satu contohnya yaitu melalui Unit Urusan Kemanusiaan AMISOM bekerjasama dengan *Office for the Coordination of Humanitarian Activities* (OCHA) milik PBB, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan badan-badan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya untuk menetapkan mekanisme koordinasi dan berbagi informasi mengenai bantuan kemanusiaan.

Melalui AMISOM bantuan dari *World Health Organization* (WHO) diberikan yang difokuskan pada bidang kesehatan dan berfungsi sebagai titik fokus teknis untuk semua program kesehatan di Somalia, memfasilitasi akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan, mencegah dan mengendalikan penyakit menular dan menerapkan sistem kesiapsiagaan darurat, melakukan imunisasi

rutin, menyediakan obat-obatan penting untuk fasilitas kesehatan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Semua pemberian bantuan tersebut dijaga ketat dan dilindungi oleh AMISOM agar jatuh ke tangan yang tepat dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungawab mengingat situasi di Somalia yang hampir sebagian besar masyarakatnya menderita kelaparan maupun penyakit karena sangat rendahnya tingkat kemakmuran masyarakatnya sehingga kehidupan rakyat sangat bergantung dari bantuan asing.

4.3.3. Menciptakan Kondisi Yang Kondusif Untuk Jangka Panjang, & Rekonstruksi

Pada Januari 2009 tentara Ethiopia menarik diri dari Somalia. Penarikan tersebut secara otomatis membuat AMISOM menjadi satu-satunya pasukan penjaga perdamaian yang berada di Somalia. Pasukan Ethiopia yang telah memerangi pemberontakan Islamis selama hampir 2 tahun ditarik dari pangkalan utama mereka di Mogadishu. Tahap pertama penarikan diumumkan pada bulan November 2009. Sejak invasi Ethiopia di awal tahun 2007 sekitar 1,3 juta orang Somalia mengungsi (sumber:http://www.cnn.com/2007/WORLD/africa/01/23/somalia.troops/index.html – diakses pada 30 Juli 2010).

Penarikan diri Ethiopia memberikan peluang bagi terciptanya politik yang lebih netral bagi pemerintahan Somalia termasuk bagi beberapa anggota yang tergabung dalam ICU.

Penarikan tentara Ethiopia juga disebabkan karena telah masuknya misi pasukan penjaga perdamaian AMISOM ke Somalia. Dengan masuknya AMISOM maka sesuai dengan janji Ethiopia bahwa jika misi pasukan penjaga perdamaian telah diturunkan ke Somalia maka Ethiopia akan menarik diri.

Untuk tercapainya mandat yang telah diberikan kepadanya AMISOM juga memberikan pelatihan terhadap kepolisian Somalia agar tercipta kondisi yang aman dan stabil dengan adanya polisi yang sudah terlatih. AMISOM telah mengirimkan pelatih untuk memberikan pelatihan kepolisian ke Somalia sebagai bagian dari mandatnya untuk melatih, mentoring, memantau *Somali Police Force* (SPF) agar dapat memenuhi standar internasional. Pelatih tersebut berasal dari Ghana, Nigeria, Uganda, dan Sierra Leone yang dipimpin oleh Wakil Komisaris AMISOM yaitu Oliver Somasa (sumber:http://www.africaunion.org/root/AU/AUC/Departments/PSC/AMISOM/amisom.htm - diakses pada 6 Juli 2010)

Penyebaran dan pelatihan tersebut merupakan wujud nyata dari upaya AMISOM untuk membantu masyarakat Somalia mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan terciptanya stabilitas di Somalia. Misi ini dimulai pada bulan juni 2010, AMISOM mengerahkan 15 pelatih ke Djibouti untuk melatih 500 petugas kepolisian Somalia. Misi tersebut juga dilakukan untuk mendukung TFG dalam membantu menstabilkan negara tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan para petugas kepolisian Somalia tersebut dapat mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Somalia.

(sumber:http://www.hiiraan.com/news2/2010/jun/amisom_to_train_500_somali_police_officers_in_djibouti.aspx – diakses pada 30 Juli 2010).

AMISOM dengan *United Nation Development Program* (UNDP) bekerja sama dengan tujuan tercapainya Somalia yang aman dan damai di mana setiap wilayah Somalia memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut dilakukan dengan mendukung Somalia untuk membangun perdamaian, rekonstruksi infrastruktur dan membangun kembali lembaga-lembaga mereka. Hal tersebut dilakukan dengan mendukung Somalia melalui program tata pemerintahan yang demokrasi, adanya aturan hukum dan keamanan, pemulihan dan mata pencaharian yang berkelanjutan, pembangunan manusia dan ekonomi serta perjuangan melawan HIV/AIDS. Dalam setiap bidang, AMISOM bekerjasama dengan UNDP untuk mendesain proyek yang memberikan kontribusi nyata untuk memperbaiki standar hidup masyarakat Somalia. UNDP sendiri sering bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil dan mitra pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek ini.

4.4. Kendala yang Dihadapi AMISOM Dalam Menangani Konflik Bersenjata Antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU) di Somalia

Seperti pada misi-misi sebelumnya AMISOM merupakan upaya dari Uni Afrika dalam mencapai tujuannya yaitu ikut terlibat dan berusaha untuk menciptakan perdamaian di benua Afrika. Namun tujuan dari misi tersebut

mendapatkan banyak kendala, kendala-kendala tersebut tentu saja berdampak pada penyebaran dari AMISOM.

Kendala AMISOM terjadi juga seperti pada pengalaman misi penjaga perdamaian Uni Afrika lainnya. Kurangnya sumber daya, kapasitas dan pendanaan, serta terbatasnya mandat yang diberikan sehingga kendala-kendala tersebut menyebabkan sulitnya untuk mengelola misi AMISOM yang berdampak pada tujuan didirikannya AMISOM yaitu untuk membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di Somalia dan berusaha menciptakan kedamaian di negara tersebut.

4.4.1. Kendala Sumber Daya Manusia

Uni Afrika sejak pendiriannya memiliki tujuan yang tinggi tetapi kurang dalam hal sumber daya manusia yang dimilikinya. Uni Afrika memiliki kapasitas yang terbatas untuk merencanakan dan mengelola operasi perdamaian. Hal tersebut merupakan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tujuannya dan juga berdampak kepada AMISOM dalam menjalankan tugasnya.

Jumlah staf yang ada dalam mengelola misi AMISOM sangat sedikit dibandingkan dengan misi yang harus dijalankan dan masing-masing personil sering membawa tanggung jawab ganda. Akibatnya tanggung jawab untuk merencanakan misi, mendukung penempatan pasukan dan peralatan, serta mengelola operasi merupakan tugas yang sulit bagi AMISOM untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang terbatas.

Kendala lainnya terjadi karena banyak negara anggota dari Uni Afrika yang tidak ikut berpartisipasi dalam memberikan pasukannya kepada AMISOM

dan ketidakmampuan dalam mengerahkan pasukan yang tersedia. Dari rencana awal penyebaran sebanyak 8.000 pasukan hanya sebanyak 2.550 pasukan dari Uganda dan 2.700.

Ketidakmampuan negara anggota dari Uni Afrika dalam memberikan kontribusi pasukan kepada AMISOM disebabkan karena negara-negara anggota Uni Afrika masih banyak yang terlibat konflik baik itu konflik antar negara maupun konflik internal seperti konflik yang masih terjadi di Kongo, Sudan, Liberia, Pantai Gading, Chad, Namibia, Rwanda, Ethiopia, dan masih banyak lagi. Ketidakmampuan Uni Afrika untuk menarik pasukan dari anggotanya mengakibatkan AMISOM terlalu kecil untuk menangani besarnya konflik yang terjadi di Somalia.

4.4.2. Kendala Keuangan Dalam Melaksanakan Misi AMISOM

Uni Afrika sebagai organisasi regional yang masing-masing negara anggotanya berada dalam tingkat ekonomi yang lemah dan juga masih banyak negara-negara anggota yang memiliki masalah dalam konflik internal sangat sulit untuk mendapatkan dana dari negara anggota. Hal tersebut tentu saja sangat menghambat dalam melaksanakan misinya dan semua hal tersebut memiliki dampak negatif terhadap efektifitas AMISOM dalam menjalankan fungsinya. AMISOM tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar dalam menjalankan misinya, dana tersebut dibutuhkan antara lain untuk persenjataan, transportasi, peralatan, medis, makanan, pasokan logistik, dan lain-lain.

Uni Afrika tidak bisa mengharapkan dana dari sumbangan negara anggotanya, oleh karena itu Uni Afrika meminta bantuan dari luar kawasan. AMISOM sangat tergantung pada sumber daya dan pendanaan dari pihak asing untuk tetap mempertahankan misinya. Sejauh ini, sedikit lebih dari $ 32 juta telah disumbangkan kepada Uni Afrika untuk menjalankan misi AMISOM, dana tersebut berasal dari mitra Uni Afrika yaitu Uni Eropa, Italia, Swedia, China dan Liga Arab, serta Amerika. Inggris sendiri sampai saat ini telah menyumbangkan £ 8.500.000 untuk penyebaran misi AMISOM, dan memberikan bantuan kepada SMPU. Uni Eropa juga mengirimkan £ 55.000.000 untuk SMPU (sumber: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Somalia%20S%202010%20234.pdf – diakses pada 7 Juli 2010).

Berikut ini tabel dana yang dibutuhkan AMISOM dalam menjalankan misinya per 12 bulan :

Tabel 4.1.

Dana yang Dibutuhkan AMISOM

Detail	Jumlah (juta Dolar)
1.Komponen Militer	538,3
2.Polisi	57,5
3.Bantuan kemanusiaan	66,2
4.Dukungan dan menejemen misi	155,5
TOTAL	**817,5**

(sumber:http://www.africa-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/amisom_Financial.htm – diakses pada 10 Agustus 2010).

Keterangan:

1. Komponen militer yaitu kebutuhan dana yang diperlukan dalam penyediaan pasukan AMISOM adalah sebesar $ 538,3 juta selama 12 bulan menjalankan misi.
2. Polisi yaitu dibutuhkan $ 57,5 juta untuk melakukan pelatihan kepolisian sesuai yang ditugaskan kepada AMISOM.
3. Bantuan kemanusiaan yaitu berupa obat-obatan, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya diperlukan sebanyak $ 66,2 juta.
4. Dukungan dan manajemen operasi yaitu dalam mengembangkan perencanaan operasi, logistik, dan lain lain dibutuhkan $ 155,5 juta.

Dana yang dibutuhkan oleh AMISOM adalah sebanyak 817,5 juta Dolar per tahun. Sedangkan bantuan yang masuk sekitar $ 427 juta pada tahun 2007 (sumber: http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaab3898.doc.htm - diakses pada 14 Agustus 2010).

4.5. Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Kendala dari AMISOM

4.5.1. Upaya Menangani Kendala Sumber Daya Manusia

Untuk menangani kendala pada masalah sumber daya manusia, Uni Afrika pada awal tahun 2007 meminta bantuan dari PBB, kemudian PBB menyepakati untuk mengirimkan staf bantuan dari militer, polisi dan staf ahli untuk membantu

bagi perencanaan dan manajemen AMISOM. Para ahli tersebut membentuk *Support Management and Planning Unit* (SMPU) untuk AMISOM yang dikelola oleh Uni Afrika. Pada akhir September 2007 staf yang dikirimkan tersebut membantu perencanaan dalam mengelola misi dari AMISOM. Dengan adanya dukungan program tersebut diharapkan akan memberikan perencanaan stategis yang diperlukan, manajemen yang baik, serta bimbingan untuk AMISOM.

Selain itu untuk membantu tercapainya perdamaian dan keamanan di Somalia telah dilatih sebanyak 20.000 tentara dan polisi untuk membantu menciptakan situasi yang aman di Somalia (sumber:http://www.photius.com/countries/somalia/economy/somalia_economy_somali_police_force_~1639.html - diakses pada 06 Juli 2010).

4.5.2. Upaya Menangani Kendala Keuangan

Untuk menanggulangi kendala tersebut maka AMISOM meminta bantuan dari PBB untuk memberikan bantuan dana yang dibutuhkan. PBB berencana memberikan bantuan dana sebesar $ 80,9 juta untuk penyediaan dukungan logistik kepada AMISOM. Bantuan dukungan terhadap AMISOM tersebut terdiri dari peralatan maupun bantuan jasa (sumber**:** http://www.un.org/News/Press/docs/2009/gaab3898.doc.htm - diakses pada 14 Agustus 2010).

PBB memastikan bahwa akan ada pengawasan yang memadai dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan dana tersebut. PBB juga

menekankan pentingnya sebuah komitmen yang kuat antara PBB dan Uni Afrika untuk memastikan menejemen keuangan yang efektif.

Memperhatikan beberapa perkembangan positif di Somalia, Amerika Serikat mendukung peran penting AMISOM dan keputusan untuk memperkuat dukungan untuk Misi tersebut. Amerika mendukung untuk memastikan kemajuan yang dibuat tidak akan dibatalkan dan jalan menuju perdamaian dan stabilitas di Somalia akan diperkuat. Amerika Serikat tidak akan memberikan kontribusi bagi Somalia melalui lembaga keuangan yang telah didirikan untuk memberikan dukungan keuangan untuk AMISOM dan membantu dalam pembentukan semua termasuk pasukan keamanan Somalia, tetapi akan terus memberikan dukungan langsung kepada misi Uni Afrika dan reformasi sektor keamanan Somalia. Amerika mendorong negara-negara lain untuk memberikan dukungan baik dalam bentuk langsung atau berkontribusi ke dana perwalian.

4.6. Keberhasilan AMISOM Dalam Menangani Konflik Bersenjata antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU) di Somalia

Setelah melaksanakan mandat yang diberikan kepada AMISOM, terdapat beberapa rekomendasi yang dibuat oleh AMISOM dalam menangani konflik yang terjadi di Somalia. Rekomendasi tersebut dibuat atas hasil misi yang dilaksanakan oleh AMISOM di Somalia dan rekomendasi tersebut disusun untuk diberikan kepada PBB, Uni Afrika, dan juga TFG. Rekomendasi tersebut antara lain yaitu:

- Menggunakan perantara untuk menjangkau kelompok-kelompok pemberontak dan menerima anggota untuk melakukan negosiasi dengan kelompok-kelompok tersebut bahkan jika mereka menolak kepemimpinan saat ini.
- Menetapkan negosiasi gencatan senjata yang komprehensif sebagai langkah pertama untuk pembicaraan damai untuk pengaturan pembagian kekuasaan.
- Setelah gencatan senjata telah terjamin, struktur yang terorganisir dalam komisi, masing-masing dengan tidak lebih dari 30 peserta, selanjutnya membuka perundingan mengenai isu-isu berikut:
    - penyusunan konstitusi baru untuk Somalia di dalam batas-batas yang diakui secara internasional dan termasuk klarifikasi internal batas-batas negara, termasuk menyikapi implikasi dari perubahan-perubahan daerah Somali Land dan Punt Land;
    - integrasi semua pasukan bersenjata menjadi tentara umum dan kepolisian daerah, yang ditujukan untuk pembentukan lingkungan yang aman untuk menyelesaikan konflik;
    - rencana komprehensif untuk adopsi konstitusi melalui referendum, penyelenggaraan pemilu nasional dan integrasi progresif dari berbagai wilayah dalam kerangka konstitusional;
    - proses keadilan transisional untuk menangani rekonsiliasi nasional.
- Somalia membawa peserta dalam proses perdamaian seperti para pemimpin klan yang berpengaruh, pemimpin masyarakat, ulama dan

masyarakat sipil untuk menciptakan momentum dan dukungan terhadap proses tersebut.

- Menegosiasikan akses kemanusiaan secara terpisah dari proses perdamaian, wilayah geografis, untuk mempercepat persediaan makanan dan meringankan situasi kemanusiaan yang mengerikan.
- Menerapkan sanksi terhadap orang-orang yang memberontak dari proses perdamaian.
- Mengesahkan operasi penjaga perdamaian PBB hanya ketika gencatan senjata yang komprehensif telah dicapai dan proses politik yang sedang berlangsung.
- Menunjuk sebuah komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh semua pihak dan memberikan rekomendasi untuk proses yudisial untuk mengatasinya dan proses rekonsiliasi yang harus dimasukkan dalam sebuah negosiasi penyelesaian konflik.
- Meningkatkan upaya untuk menerapkan perbatasan di Somalia.
- Presiden TFG yaitu Abdullahi Yusuf agar mengundurkan diri dari jabatannya dan berpartisipasi dalam proses politik dalam peran istimewa sebagai mantan presiden TFG.
- Mengutuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagai bagian dari komitmen terhadap proses perdamaian, memperjelas posisi mengenai demokrasi dan peran Syariah (hukum Islam) dalam mengatur masyarakat

Somalia dan meninggalkan hubungan apapun dengan al-Qaeda atau teroris lainnya.

- Somalia harus berhenti atas pengklaiman wilayah Ogaden dan meyakinkan Ethiopia sebagai komitmen terhadap prinsip-prinsip bertetangga yang baik.
- Menarik pasukan Etiopia dengan cepat dan sesuai dengan persetujuan.
- Menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara Ethiopia di Somalia dan mendukung proses politik yang baru seperti diuraikan di atas.
- Mengakhiri pemberontakan di Somalia.
- Menyeimbangkan dengan strategi kontra-terorisme di Somalia untuk memberikan bobot yang lebih besar melalui pendekatan politik, dukungan negosiasi intra Somalia, termasuk dengan pemberontakan Islam, dan mempertimbangkan menghilangkan individu dan kelompok dari daftar terorisme sebagai imbalan atas peran yang konstruktif dalam proses damai.
- Mendukung proses perdamaian seperti dijelaskan di atas, memberikan dukungan kepada Perdana Menteri Nur Adde dan menekan pengunduran diri Abdullahi Yusuf sebagai presiden.
- Dukungan politis dan finansial serta proses politik yang dijelaskan di atas dan dukungan terhadap Perdana Menteri Nur Adde, sementara menghentikan semua dukungan dengan Presiden Abdullahi Yusuf sehingga mendorong pengunduran dirinya.

- Memulai perencanaan kontingensi untuk mendukung evakuasi cepat terhadap pasukan AMISOM jika misi ini berulang kali diserang di Mogadishu, dan memimpin pasukan konsultasi dengan negara-negara anggota misi perdamaian PBB untuk mendukung pelaksanaan perjanjian gencatan senjata (sumber: http://www.african-union.org/root/au/auc/departments/psc/amisom/amisom.htm. - diakses pada 16 Agustus 2010)

Kondisi yang kacau dimana kelaparan, kejahatan, kemiskinan, dan konflik yang tidak juga kunjung usai di Somalia membuat Somalia merupakan sebuah negara yang telah di cap gagal oleh PBB maupun dunia internasional. Berbagai cara telah diusahakan untuk mencapai keamanan tetapi tetap saja konflik terus berlangsung sehingga mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat Somalia.

Pasukan penjaga perdamaian yang yang dikerahkan oleh PBB mulai dari UNOSOM I, UNITAF, dan terakhir UNOSOM II tidak berlangsung lama dan juga tidak mampu untuk meredakan konflik yang terus bergejolak di Somalia. Saat ini AMISOM yang merupakan satu-satunya penjaga perdamaian yang masih tetap berada di Somalia untuk membantu meredakan konflik yang terjadi di Somalia.

Dengan adanya penurunan misi dari Uni Afrika yaitu AMISOM dan sebagai aplikasi dari rekomendasi yang diberikan tersebut maka ICU telah membubarkan diri dengan terpilihnya Syeikh Sharif Ahmed sebagai presiden Somalia yang baru. Maka TFG lebih mendapatkan perlindungan dari kelompok pemberontak yang terus melawan TFG, pada awalnya TFG kesulitan untuk

menahan dan melawan kelompok pemberontak tersebut yang terus memberikan perlawanan terhadap TFG. Tetapi setelah dikerahkan AMISOM maka TFG mendapat bantuan untuk melawan kelompok pemberontak tersebut.

Selain itu AMISOM juga menjaga ketat bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada rakyat Somalia agar tidak jatuh ke tangan yang salah karena sebelumnya pada saat AMISOM belum diturunkan situasi yang kacau membuat para pemberontak menjarah bantuan–bantuan kemanusiaan tersebut dan seringkali disalahgunakan sehingga bantuan tersebut tidak sampai kepada masyarakat Somalia yang membutuhkan.

Dengan adanya pasukan penjaga perdamaian AMISOM juga telah membuat rakyat Somalia merasa lega karena tidak ada lagi intervensi Ethiopia yang membuat masyarakat Somalia resah. Dengan penarikan pasukan Ethiopia akan memberikan harapan baru bagi pemerintahan Somalia yang lebih netral dan lebih mengerti keinginan rakyat Somalia.

Dengan pejagaan ketat oleh AMISOM dan terpilihnya Syeikh Sharif Ahmed sebagai presiden Somalia yang baru diharapkan akan memberikan hasil nyata dari upaya untuk menghentikan konflik di negara tersebut dan tercipta kedamaian yang diharapkan oleh semua pihak. Setelah mundurnya Abdullahi Yusuf dari kursi presiden dan terpilihnya Syeikh Sharif Ahmed yang merupakan pemimpin dari ICU sebagai presiden Somalia yang baru maka ICU tidak lagi menjadi suatu kelompok penentang bagi pemerintahan Somalia.

Sesuai dengan keinginan awal dari ICU untuk memberlakukan syariat Islam maka Somalia akan memberlakukan hukum syariah Islam. Penerapan

hukum syariah Islam di Somalia, diusulkan oleh organisasi *International Union of Muslim Scholars* (IUMS) pada presiden Somalia yang baru terpilih, Syeikh Sharif Ahmed sebagai salah satu rekomendasi gencatan senjata dengan kelompok-kelompok Islamis yang berseberangan dengan pemerintah Somalia.

Setelah pemerintah negeri Muslim di benua Afrika itu menyatakan bahwa hasil rapat kabinet dengan bulat menyetujui rencana penerapan hukum Syariah Islam di Somalia. Dengan demikian, pengesahannya tinggal menunggu ratifikasi dari parlemen sebelum hukum syariah Islam resmi diberlakukan di Somalia.

4.7. Analisa Peranan AMISOM Dalam Menangani Konflik Bersenjata antara *Transitional Federal Government* (TFG) dan *Islamic Court Union* (ICU) di Somalia

Uni Afrika membentuk *Peace Support Operations* (PSOs) karena keinginan dari Uni Afrika untuk mewujudkan perdamaian di kawasan Afrika dan AMISOM merupakan PSOs ketiga yang dibentuk oleh Uni Afrika dalam upaya menangani konflik yang terjadi di Somalia.

AMISOM sebagai bentuk dari sebuah pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk oleh Uni Afrika dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian di negara Somalia, memiliki peran dalam menangani konflik yang terjadi antara ICU dan TFG di Somalia. Keberadaan AMISOM sangat membantu bagi pemerintahan Somalia dalam menangani konflik yang terjadi karena AMISOM telah melaksanakan tugas-tugas yang telah dimandatkan kepadanya.

Terdapat tiga mandat yang diberikan kepada AMISOM, mandat tersebut adalah pertama, mendukung *Transitional Federal Government* (TFG) dalam upaya menstabilkan negara, dialog, & rekonsiliasi. Kedua, memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan. Ketiga menciptakan kondisi yang kondusif untuk jangka panjang, & rekonstruksi.

Keberadaan dari AMISOM sangat membantu bagi pemerintahan Somalia yaitu TFG dalam upaya menangani konflik yang terjadi. AMISOM mendukung TFG untuk melawan pemberontakan yang terjadi di Somalia. Dengan bantuan perlawanan dari AMISOM maka pemberontakan di Somalia yang semula menguasai ibukota Somalia yaitu Mogadishu mulai kehilangan wilayah-wilayah kekuasaannya.

ICU pun pada akhirnya membubarkan diri karena telah kehilangan wilayah-wilayah kekuasaan mereka, tetapi melalui rekomendasi dari AMISOM untuk PBB, Uni Afrika, dan Pemerintahan Somalia maka Syeikh Sharif Ahmed terpilih sebagai presiden Somalia yang baru.

Dari mandat yang diberikan kepada AMISOM, menurut peneliti mandat yang paling berhasil dilakukan di antara mandat yang lainnya adalah mengenai pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Somalia. Karena dalam melaksanakan mandat tersebut AMISOM melakukan pengawasan bagi jalur-jalur yang biasa digunakan untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Somalia.

Selain dari melaksanakan mandat yang telah diberikan AMISOM bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional lainnya khususnya PBB

dalam upaya memecahkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan misinya sehingga misi perdamaian dapat berjalan.

Menurut peneliti, AMISOM sangat membantu dalam menangani konflik yang terjadi antara TFG dan ICU di Somalia. Dalam misi tersebut AMISOM memiliki peranan dalam membantu menangani konflik yang terjadi di Somalia melalui mandat yang telah diberikan kepadanya.